

**KONSTRUKSI DAN TRANSFORMASI NILAI KETUHANAN YANG
MAHA ESA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI
PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai
Pendidikan Anti Korupsi Pada Universitas Pasundan)**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor
Pendidikan Kewarganegaraan**



Oleh:

Subelo Wiyono

NIM 1604665

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2021

Subelo Wiyono, 2021

**KONSTRUKSI DAN TRANSFORMASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**KONSTRUKSI DAN TRANSFORMASI NILAI KETUHANAN YANG
MAHA ESA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI
PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai
Pendidikan Anti Korupsi Pada Universitas Pasundan)**

DISERTASI

Oleh

Subelo Wiyono

Sebuah Disertasi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Doktor
Pendidikan (Dr.) pada a Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
Sekolah Pascasarjana

© Subelo Wiyono 2021
Universitas Pendidikan Indonesia
Pebruari 2021

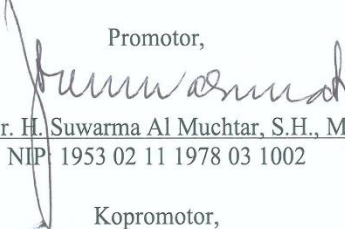
Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Disertasi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.


SUBELO WIYONO

KONSTRUKSI DAN TRANSFORMASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA
DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (STUDI
KASUS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA UNIVERSITAS PASUNDAN)


Promotor,


Prof. Dr. H. Suwarma Al Muchtar, S.H., M/Pd.
NIP: 1953 02 11 1978 03 1002

Kopromotor,


Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed.
NIP: 1963 08 20 1988 03 1001

Anggota,


Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A.
NIP: 1954 10 07 1973 02 1002

Penguji,



Prof. Dr. Drs. H. Astim Riyanto, S.H., M.H.
NIP: 1949 04 02 1976 03 1001

Penguji,


Prof. Dr. H. Cecep Darmawan S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si.
NIP: 1969 09 29 1994 02 1001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan Doktor
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia


Prof. Dr. H. Cecep Darmawan S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si.
NIP: 1969 09 29 1994 02 1001

ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji tentang konstruksi dan transformasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pengamalan nilai Pancasila yang berlandaskan spiritualitas dapat mewujudkan pendidikan anti korupsi. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi berdampak terhadap kehidupan ekonomi, sosial kemasyarakatan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan, serta berbagai aspek penting lainnya. Kajian dari disertasi ini adalah ontologi Pancasila dan epistemologinya dalam pembelajaran PKn dengan konteks kearifan lokal untuk pencegahan tindak pidana korupsi melalui pembentukan akhlakul karimah mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *case study*. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Pasundan Bandung (UNPAS), dengan pertimbangan UNPAS memiliki motto dan misi yaitu mengembangkan nilai luhur Sunda Islam sehingga memiliki nilai *Pengkuh Agamana, luhung elmuna dan jembar budayana*. Hal tersebut selaras dengan kajian yang diteliti yaitu menghidupkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa. Proses pengumpulan data penelitian berupa pengamatan langsung dan wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah umum PKn, para pakar di berbagai bidang (filsafat Pancasila, PKn, hukum), kajian dokumen-dokumen terkait, serta mahasiswa. Berdasarkan kepada kajian peneliti hasilnya: (1) Pendidikan anti korupsi adalah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, namun dalam praktiknya tidak terdapat kurikulum secara khusus yang mengkaji terhadap pembelajaran karakter anti korupsi. Tidak adanya metode pembelajaran anti korupsi secara khusus menjadi kendala tersendiri dalam menentukan landasan dasar pembentukan pendidikan anti korupsi, sehingga menyebabkan beragamnya metode pembelajaran dalam pembentukan pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh dosen (2) Pendidikan anti korupsi belum memiliki pendekatan khusus secara teoretis tentang nilai dasar yang menjadi landasan pendidikan anti korupsi. Landasan nilai tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai pijakan dasar untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi. (3) Pendidikan Kewarganegaraan dapat di kembangkan menjadi sarana dalam membentuk karakter yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan. (4) Metode pembentukan pribadi anti korupsi melalui nilai Ketuhanan dapat digunakan dalam pengembangan karakter mahasiswa. Sebagai bangsa yang memiliki nilai spiritual, mahasiswa seharusnya menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sosial, tidak lagi mengimplementasikan spiritualitas hanya dalam lingkup individu tetapi bisa memberikan manfaat secara kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. (5) Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara umum sudah memiliki landasan dasar dalam membentuk pendidikan anti korupsi. (6) Budaya Sunda sebagai kearifan lokal memiliki nilai anti korupsi

Kata kunci:

Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Nilai Ketuhanan, Pendidikan Anti Korupsi.

Subelo Wiyono, 2021

KONSTRUKSI DAN TRANSFORMASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ABSTRACT

The current study examined the value construction and transformation of *Ketuhanan yang Maha Esa* in Civic Education. The application of Pancasila values, which is based on spiritualism, personalizes an anti-corruption character. Various criminal acts of corruption have caused serious issues in a lot of areas; economy, society, governance, politics and democracy, law enforcement, defense and security, and several important aspects. The examination of the study involves the ontology and epistemology of Pancasila within Civic Education as a foundation of students' *akhlakul karimah* (moral values) through local wisdom as a means of preventive action. The study adopted a case study design within a qualitative approach in an attempt to seek possibilities drawn in this study. The study was conducted in one of the private universities in Bandung, namely UNPAS, after giving some thoughts on some research considerations that it holds a vision to develop the Islamic values reflected in *Pengkuh Agamana* and *Jembar Budayana* '. Therefore, the belief is in line with the aim of this study, which is to revive the moral value of *Ketuhanan yang Maha Esa*. The data collection process includes observation and interviews with lecturers of Civic Education, experts in related fields (philosophy of *Pancasila*, Civic Education, and law), relevant literature, and also students. The conclusion of the examination is: (1) anti-corruption education is an essential undertaking, yet this essential action is not fully supported by a curriculum that runs specific issues about the anti-corruption character. The absence of anticorruption learning methods becomes an obstacle in determining the very foundation of the establishment of anticorruption character, which makes possible the birth of various teaching methods initiated by the lecturers in constructing the anticorruption character among students. (2) Anti-corruption education lacks a specific theoretical approach regarding the moral values of an anticorruption character. Such values should have become the ground point of the character-building process. (3) Civic education could be developed as a medium to encourage a character maturing process based on spiritualism. (4) The anticorruption formation through spiritual values (*Ketuhanan*) method could be utilized in developing students' character. As a nation which highly praises the spiritual values, students should apply these values in their social life – not only individually, but also collectively as a community. (5) In general, Pancasila and Civic Education as subjects have already possessed the basic foundation to establish the anticorruption character. (6) Sundanese culture as a pearl of local wisdom has anticorruption values.

Keywords:

Civic Education, Pancasila, spiritual values, anticorruption character

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	18
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Struktur Organisasi Disertasi	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Konstruksi dan Transformasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa	23
B. Nilai Spiritual dalam Pancasila	27
1. Nilai	31
2. Nilai Spiritual Pancasila	33
C. Hakikat Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan.	38
1.1. Spiritualitas Ketuhanan Yang Maha Esa	44
1.2. Spiritualitas dalam Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	44
1.3. Spiritualitas dalam Persatuan Indonesia	45
1.4. Spiritualitas dalam Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan	46
1.5. Spiritualitas dalam Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	47
1. Nilai Spiritual dalam Pendidikan Kewarganegaraan	47
2. Spiritualitas Pendidikan Anti Korupsi	49
D. Tindak Pidana Korupsi	55
1. Tindakan Pencegahan Terhadap Korupsi	64
2. Pencegahan melalui Pendidikan Karakter	69
E. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan	71

F. Pembentukan Karakter Anti Korupsi.....	79
G. Penelitian Terdahulu.....	81
1. Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PKn sebagai Penguat Karakter Bangsa	81
2. Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Mengembangkan Jatidiri Bangsa.....	82
BAB III METODE PENELITIAN.....	86
A. Partisipan dan Tempat Penelitian	86
B. Lokasi Penelitian	86
C. Desain Penelitian	87
D. Metode Penelitian	89
E. Teknik Pengumpulan Data	90
1. Studi dokumentasi	92
2. Wawancara mendalam.....	92
3. Observasi	93
F. Analisis Data.....	95
1) Teknik Analisis Data	95
2) Penyajian Data.....	96
3) Keabsahan data.....	97
G. Tahapan Penelitian.....	98
H. Isu Etik.....	98
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	100
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	101
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	104
1. Transformasi Pembelajaran Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan..	104
2. Nilai Spiritual Pancasila Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	117
3. Implementasi Nilai Spiritual Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi	133
4. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	140
5. Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	146
6. Nilai Budaya Sunda di Universitas Pasundan	160
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	165

1. Konstruksi Spiritualitas Pancasila Mentransformasi Pendidikan Kewarganegaraan	165
2. Konstruksi Spiritualitas Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	169
3. Transformasi Spiritualitas Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan .	171
4. Landasan Epistemologi Spiritualitas Pancasila dalam Filsafat Anti Korupsi..	173
5. Integrasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Sebagai Pendidikan Anti Korupsi	176
6. Nilai Budaya Sunda Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	179
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI	185
A. Simpulan.....	185
B. Implikasi.....	189
C. Rekomendasi	191
DAFTAR PUSTAKA	194
LAMPIRAN.....	205

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterampilan PKn.....	40
Tabel 2 Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah.....	50
Tabel 3 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara	51
Tabel 4 Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	108
Tabel 5 Karakter yang Harus Dimiliki Peserta Didik	128
Tabel 6 Muatan Pembelajaran PPKn di Universitas Pasundan.....	147
Tabel 7 Pengembangan Karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan.....	166
Tabel 8 Capaian Pembelajaran dalam Mata Kuliah PKn.....	176
Tabel 9 Materi Pembelajaran Budaya Sunda	180

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Suap.....	62
Gambar 2 Teknik Metode Kualitatif	91
Gambar 3 Desain Studi Kasus.....	96
Gambar 4 Interaksi Mahasiswa.....	156
Gambar 5 Faktor Pengaruh Korupsi	175

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, M. (1969). *Agama dalam pembentukan Keperibadian Nasional*. Yogyakarta: Yayasan An-Nida.
- Alwasilah, Adeng Chaedar. 2006. *Pokoknya Sunda: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Diterbitkan atas kerja sama Kiblat [dengan] Pusat Studi Sunda.
- Arif, S. (2018). *Islam, Pancasila, dan Deradikalisme Meneguhkan Nilai ke Indonesiaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Basabose, J. D. D. (2019). *Anti-corruption Education and Peacebuilding*. Switzerland: Springer Nature Switzerland.
- Cogan, J., & Derricot. (1998). *Citizenship for The 21 Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research_ Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4th ed.). Boston: Pearson Education.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The SAGE Handbook of Qualitative Research. The SAGE Handbook*, 784. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dewey, J. (1959). *The school and society. In Dewey on education*. New York: Teachers College Press.
- Djahiri, K. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral-VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Laboratorium PMP IKIP Bandung.
- Ekadjati, Edi Suhardi. 2014. *Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah*. Bandung: PT Dunia Putaka Jaya.
- Elis Suryani, N. S. 2011. "Ragam Pesona Budaya Sunda." Bogor: *Ghalia Indonesia*
- Hakam, K. A. (2012). Model Pembudayaan Karakter di Sekolah Dasar. In D. Budimansyah (Ed.), *Dimensi-Dimensi Praktik Pendidikan Karakter* (1st ed., pp. 83–103). Bandung: Widya Aksara Press.
- Harmanto. (2012). *Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PKn sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hobbes, T. (1987). *1651. Leviathan* London.

Subelo Wiyono, 2021

KONSTRUKSI DAN TRANSFORMASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Ismail, F. (1999). *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ismaun. (1981). *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. C.V. Carya Remaja.
- Kaelan, & Zubaidi, A. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila, Pandangan Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila* (9th ed.). Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2014). *The Philosophy of Pancasila* (1st ed.). Yogyakarta: Paradigma Press.
- Kalijernih, F. K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan : Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipata
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2017). *Pendidikan Karakter* (1st ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Komalasari, Kokom, and Didin Saripudin. 2017. *Pendidikan Karakter*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama.
- Kuntowijoyo. (1997). *Agama dan Demokrasi di Indonesia, dalam Riza Norma-norma Arfani*. Jakarta: Rajawali
- Latif, Y. (2012). *Negara Paripurna* (4th ed.). Jakarta: Gramedia.
- Latif, Y. (2014). *Mata Air Keteladanan* (Y. Ibrahim, Idi Subandi, Iriantara (ed.); 1st ed.). Jakarta: Mizan.
- Latif, Y. (2015). *Revolusi Pancasila* (1st ed.). Jakarta: Mizan.
- Li, Desun. (2013). *Value theory: a research into subjectivity*. Berlin: Springer.
- Lickona, T. (2013). *Character Matters: How to Make Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtue*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchtar, S. Al. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Potensi Mandiri.
- Muchtar, S. Al. (2017a). *Ilmu Kewarganegaraan* (1th ed.). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Muchtar, S. Al. (2017b). *Pendidikan Kewarganegaraan* (1st ed.). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan

Indonesia.

- Pendidikan Anti Korupsi, T. P. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Y. K. Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari (ed.)). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Rahmat, Sapriya, Sundawa, D., Masyitoh, I. S., & Syaifullah. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan* (Sapriya (ed.); III). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rianto, B. S. (2009). *Koruptor Go to Hell, Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Bandung: Hikmah.
- Robet, Robertus, Tobi, H. B. (2014). *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan* (I). Tangerang: Marjin Kiri.
- Samani, M. dan H. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Sanusi, A. (2016). *Pendidikan untuk Kearifan* (Y. Iriantara (ed.); 1st ed.). Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sapriya. (2012). Perlunya Reorientasi Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. In Sapriya, A. Dahliana, D. Iswandi, C. Cuga, & R. Machfiroh (Eds.), *Transformasi 4 Pilar Kebangsaan* (1st ed., pp. 31–40). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Setiawan, H., & Kurnia, A. (2018). *Kuliah Budaya Sunda*. Bandung: Unpas Press & YPT Pasundan.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sumantri, E. (2008). *An Outline of Citizenship and Moral Education in Major Countries of Southeast Asia* (1st ed.). Bandung: Bintang WarliArtika.
- Toynbee, A. (2006). *Sejarah Umat Manusia* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Toynbee, A. J. (1987). *A Study of History: Volume I: Abridgement of* (Vol. 1). New York Toronto: Oxford Paperbacks.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2011). *IMPLEMENTASI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN JATIDIRI BANGSA*. Bandung: Indonesia University of Education.

- Winarno. (2012). Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. In D. Budimansyah (Ed.), *Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter* (1st ed., pp. 158–185). Bandung: Widya Aksara Press.
- Winarno. (2015). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (3rd ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. (2016). *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S. (2012). Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan. In Sapriya, A. Dahliyana, D. Iswandi, C. Cuga, & R. Machfiroh (Eds.), *Transformasi 4 Pilar Kebangsaan* (1st ed., pp. 1–18). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wingarta, P. S. (2012). Transformasi (Nilai-Nilai Kebangsaan) Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran PKn (Perspektif Kewaspadaan Nasional). In Sapriya, A. Dahliyana, D. Iswandi, C. Cuga, & R. Machfiroh (Eds.), *Transformasi 4 Pilar Kebangsaan* (1st ed., pp. 19–30). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yin, R. K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Andersson, S., & Heywood, P. M. (2009). The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency International's Approach to Measuring Corruption. *Political Studies*, 57(4), 746–767. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00758.x>
- Arnold A. Rogow and Harold D. Lasswell. *Power, corruption, and rectitude*. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1963. v, 138 pp. <https://doi.org/10.1002/ncr.4100521115>
- Asmaroini, A. P. (2017). MENJAGA EKSISTENSI PANCASILA DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50–64.
- Barkemeyer, R., Preuss, L., & Ohana, M. (2018). Developing country firms and the challenge of corruption: Do company commitments mirror the quality of national-level institutions? *Journal of Business Research*, 90, 26–39.

Subelo Wiyono, 2021

KONSTRUKSI DAN TRANSFORMASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.04.025>

- Bauhr, M., Charron, N., & Nasiritousi, N. (2013). Does Corruption Cause Aid Fatigue? Public Opinion and the Aid-Corruption Paradox1. *International Studies Quarterly*, 57(3), 568–579. <https://doi.org/10.1111/isqu.12025>
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559.
- Contreras-Hermosilla, A. (1997). The “Cut-and-Run” Course of Corruption in the Forestry Sector. *Journal of Forestry*, 95(12), 33–36. <https://doi.org/10.1093/jof/95.12.33>
- Darmawan, C. (2015). Legislative Strengthening and Empowerment: Efforts to Strengthen Local Governance and Accountability through Provincial Parliaments in Indonesia. *American Journal of Applied Sciences*, 12(11 SE-Research Article). <https://doi.org/10.3844/ajassp.2015.802.809>
- Delgado, C. (2005). A discussion of the concept of spirituality. *Nursing Science Quarterly*, 18(2), 157–162. <https://doi.org/10.1177/0894318405274828>
- Ditta, L. (2010). *Character Education BT - Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology* (C. S. Clauss-Ehlers (ed.); pp. 189–191). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71799-9_62
- Fearnley-Sander, M., & Yulaelawati, E. (2008). Citizenship Discourse in the Context of Decentralisation: The Case of Indonesia. In *Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific* (pp. 111–126). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8745-5_7
- Ghoni, A. (2018). TITIK TEMU KONSEP PANCASILA DAN CIVIL RELIGION PERSPEKTIF ROBERT N BELLAH. *Inovatif*, 4(1), 11–20.
- Haleem, M. A. S. A. (2018). The Role of Context in Interpreting and Translating the Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*, 20(1), 47–66. <https://doi.org/10.3366/jqs.2018.0320>
- Haris, H. (2012). Revitalisasi dan Reinterpretasi Pendidikan Pancasila: Upaya Mengatasi Fenomena Konflik Kekerasan Melalui Sektor Pendidikan” dalam Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Uni-versitas Pendidikan Indonesia*.
- Hendi, Y. P. (2014). To be corrupt or not to be corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia. *Journal of Money Laundering Control*, 17(3), 306–326. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2013-0045>
- Hendi, Y. P. (2016). Sight beyond sight: Foreseeing corruption in the Indonesian government through behavioral analysis. *Journal of Financial Crime*, 23(2),

Subelo Wiyono, 2021

KONSTRUKSI DAN TRANSFORMASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

289–316. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2014-0063>

- Hermawan, W. (2016). Konsep Negara Menurut Al-Farabi. *Jurnal*.
- Heyneman, S. P. (2004). Education and corruption. *International Journal of Educational Development*. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2004.02.005>
- Hillman, A. L. (2004). Nietzschean Development Failures. *Public Choice*, 119(3), 263–280. <https://doi.org/10.1023/B:PUCH.0000033330.54694.fe>
- Hollyer, J. R., & Wantchekon, L. (2014). Corruption and Ideology in Autocracies. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, 31(3), 499–533. <https://doi.org/10.1093/jleo/ewu015>
- HOWELL, J. D. (2010). Sufism and the Indonesian Islamic Revival. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 701–729. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2700107>
- Hoy, A. (2018). Invisibility, Illegibility, and Stigma: The Citizenship Experiences of Divorced Gays and Lesbians. *Journal of Divorce & Remarriage*, 59(2), 69–91. <https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1375332>
- Ibrahim, R., Yusoff, M. A., & Koling, H. M. (2018). Patterns and causes of corruption among government officials in Indonesia. *Adabi: Journal of Public Administration and Business*, 1(1), 74-91.
- Isnendes, R. (2019). Tali Paranti as A Local Wisdom of Sunda Traditional Society. <https://doi.org/10.4108/eai.29-8-2019.2288997>
- Junemana, Meinarno, E. A., & Rahardjo, W. (2012). Symbolic Meaning of Money, Self-esteem, and Identification with Pancasila Values. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65, 106 – 115. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.099>
- Kanas, N. (2018). Spirituality, humanism, and the Overview Effect during manned space Missions. *Acta Astronautica*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2018.08.004>
- Khoeriyah, N., Wardo, & Sariyatun. (2018). Learning history integrated local wisdom values “babad Banyumas” to build a student’s national identity. *SHS Web of Conferences*, 42(91), 6. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20184200091>
- Komalasari, K. (2009). The effect of contextual learning in civic education on students’ civic competence. *Journal of Social Sciences*, 5(4), 261-270.
- Komalasari, Kokom. 2009. “The Effect of Contextual Learning in Civic Education on Students’ Civic Competence.” *Journal of Social Sciences* 5(4):261–70.

- Kyle, J. (2018). Local Corruption and Popular Support for Fuel Subsidy Reform in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 51(11), 1472–1503. <https://doi.org/10.1177/0010414018758755>
- Lambsdorff, J. G. (Ed.). (2007). Enemies of corruption. In *The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence and Policy* (pp. 27–57). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9780511492617.003>
- Lippiello, T. (2018). The paradigms of religious and philosophical plurality: The return of “spirituality” in China today. *Philosophy and Social Criticism*, 44(4), 1–11. <https://doi.org/10.1177/0191453718760358>
- Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2012). Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator. *World Journal of Social Sciences*, 2(6), 159–168.
- Maarif, S. (2018). Education as a Foundation of Humanity: Learning from the Pedagogy of Pesantren in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(2), 104–123.
- MacMullen, I. (2018). ‘Religious schools, civic education, and public policy: A framework for evaluation and decision.’ *Theory and Research in Education*, 16(2), 141–161. <https://doi.org/10.1177/1477878518769397>
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educationis*, II(2).
- Maroni, & Ariani, N. D. (2018). Problematic Dilemma of The Limitation of Granting Remission for Corruption Prisoners. *Fiat Justisia*, 12(2), 95–110.
- McMullin, I. (Ed.). (2018). Corrupting the Youth. In *Existential Flourishing: A Phenomenology of the Virtues* (pp. 129–151). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781108617260.007>
- Mezirow, J. (1978). Perspective Transformation. *Adult Education*, 28(2), 100–110. <https://doi.org/10.1177/074171367802800202>
- Modesto, J. G., & Pilati, R. (2020). “Why are the Corrupt, Corrupt?”: The Multilevel Analytical Model of Corruption. *The Spanish Journal of Psychology*, 23, e5. <https://doi.org/DOI:10.1017/SJP.2020.5>
- Muir, S., & Gupta, A. (2018). Rethinking the Anthropology of Corruption: An Introduction to Supplement 18. *The University of Chicago Press*, 59(18), 1–12. <https://doi.org/10.1086/696161>
- Murdiono, M. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *Jurnal SOCIA*, 15(1), 166–186.
- Nurdin, E. S. (2017). Civic Education policies: Their effect on university students’

- spirit of nationalism and patriotism. *Citizenship, Social and Economics Education*, 16(1), 69–82. <https://doi.org/10.1177/2047173416688039>
- Palifka, B. J., & Rose-Ackerman, S. (Eds.). (2016). Culture and Corruption. In *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed., pp. 233–272). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9781139962933.009>
- Peters, A. (2019). Corruption as a Violation of International Human Rights. *European Journal of International Law*, 29(4), 1251–1287. <https://doi.org/10.1093/ejil/chy070>
- Rokeach, M., & Regan, J. F. (1980). The role of values in the counseling situation. *The Personnel and Guidance Journal*, 576–582.
- S.T., Q. J. (2011). Chapter 10 Indonesia. In J. S. T. Quah (Ed.), *Curbing Corruption in Asian Countries: An Impossible Dream?* (Vol. 20, pp. 341–395). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S0732-1317\(2011\)0000020017](https://doi.org/10.1108/S0732-1317(2011)0000020017)
- Salter, M. (2018). Abuse and Cruelty in Religious Bureaucracy: The Case of the Anglican Diocese of Newcastle. *Journal of Australian Studies*, 42(2), 243–255. <https://doi.org/10.1080/14443058.2018.1459782>
- Santoso, H., Siswomihardjo, K. W., & Kuswanjono, A. (n.d.). Konsep landasan filosofis pengembangan ilmu bersumber pada nilai-nilai ke-ugm-an. *Jurnal Kawistara*, 6(3), 288–299.
- Schmidtz, D. (2018). AN ANATOMY OF CORRUPTION. *Social Philosophy and Policy*, 35(2), 1–11. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0265052519000062>
- Setiyawan, A. (2016). Konsep Pendidikan Menurut Al-Ghazali dan Al-Farabi (Studi Komparasi Pemikiran). *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(01), 51–71.
- Seyle, C., Cortright, D., & Wall, K. (Eds.). (2017). Countering Corruption. In *Governance for Peace: How Inclusive, Participatory and Accountable Institutions Promote Peace and Prosperity* (pp. 130–152). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781108235471.008>
- Sina, L. (2008). Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1), 39–51.
- Smith, B., & Thomas, A. (1998). *Axiology*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780415249126-L120-1>
- Spalding, A. (2020). Anti-Corruption: Recaptured and Reframed. In A. von Arnould, K. von der Decken, & M. Susi (Eds.), *The Cambridge Handbook of New Human Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric* (pp. 517–530).

Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781108676106.041>

- Suhartati, L. A. (2016). Building anti-corruption compliance through national integrity system in Indonesia: A way to fight against corruption. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 932–947. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2015-0054>
- Thompson, C. (1992). Philosophy and Corruption of Language. *Philosophy*, 67(259), 19–31.
- Tsalapatanis, A. (2018). Citizenship, Belonging, and Nation-States in the Twenty-First Century. *International Sociology Reviews*.
- Umam, M. H. (2013). Pandangan Islam Tentang Korupsi. *Teosofi*, 3(2), 462–482. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.462-482>
- Umam, M. H. (2013). Pandangan Islam Tentang Korupsi. *Teosofi*, 3(2), 462–482. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.462-482>
- Umar, H. (2012). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi. *JOURNAL OF ACCOUNTING AND AUDITING*, 8(Mei), 109–122.
- Vu, H. Van, Tran, T. Q., Nguyen, T. Van, & Lim, S. (2018). Corruption, Types of Corruption and Firm Financial Performance: New Evidence from a Transitional Economy. *Journal of Business Ethics*, 148(4), 847–858. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3016-y>
- Warning, S., & Duerrenberger, N. (2018). Corruption and education in developing countries: The role of public vs. private funding of higher education. *International Journal of Educational Development*, 62, 217–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.05.002>
- Widjojanto, B. (2012). Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1), 27–45.
- Wiyono, Subelo, Darmawan, C., & Malihah, E. (2015). The Implementation of Values in the Belief in God as The Almighty as a Basis of Anti-Corruption Education. *Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 19(1), 110–126.
- Wrage, S., & Wrage, A. (2005). Multinational Enterprises as “Moral Entrepreneurs” in a Global Prohibition Regime Against Corruption. *International Studies Perspectives*, 6(3), 316–324. <https://doi.org/10.1111/j.1528-3577.2005.00210.x>
- Zaenudin, Sudarsono, Budiono, A. R., & Winarno, B. (2018). Norm of Recovery of State Financial Loss because of Criminal Law of Corruption in Indonesia. *Law, Policy and Globalization*, 71, 159.
- Zamaletdinov, R. R., Yudina, N. P., Lavrentyeva, E. I., Savva, L. I., & Pugacheva, N. B. (2016). International Review of Management and Marketing Practical

Recommendations on the Improvement of the Effectiveness of Anti-corruption Policy in Universities. *International Review of Management and Marketing*, 6(2), 390–396.

Zhao, S. (1998). A State-Led Nationalism: The Patriotic Education Campaign in Post-Tiananmen China. *Communist and Post-Communist Studies*, 31(3), 287–302. [https://doi.org/10.1016/S0967-067X\(98\)00009-9](https://doi.org/10.1016/S0967-067X(98)00009-9)

Zimring, F. E., & Johnson, D. T. (2005). On the Comparative Study of Corruption. *The British Journal of Criminology*, 45(6), 793–809. <https://doi.org/10.1093/bjc/azi042>

Makalah, Tulisan, Pidato dan Proceeding:

Ardisasmita, S. (2006). DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. *SEMINAR NASIONAL UPAYA PERBAIKAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH*.

Herzberger, R. (2018). Education & Indian Nationalism. *Studies in Humanities and Social Sciences*.

Hofweber, T. (2018). *Logic and Ontology*. Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/logic-ontology>

International, T. (2018). *Anti-Corruption Solutions*. CC BY-ND 4.0. <https://www.transparency.org/glossary>

Jimly Asshiddiqie, S. H. (2008). *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*.

Jones, C. (2005). Character, virtue and physical education. *European Physical Education Review*, 11(2), 139–151.

Khumaidi, M. A. (2015). *Pancasila: Sebuah Kesepakatan Sebagai Bangsa / Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.

KPK. (2018). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018*. 60. <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/Laporan-Tahunan-KPK-2018-.pdf>

KPK. (2020). *Bahaya dan Dampak Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis>

KPK.go.id. (2019). *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah*. Komisi Pemeberantas Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah>

- Meagher, P. (2002). *Anti-Corruption Agencies: A Review of Experience*.
- Miller, Seumas, "Corruption", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/corruption/>>.
- Steup, M., & Neta, R. (2020). *Epistemology*. Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/epistemology/>
- Suneki, Sri dan Sutono, A. (2015). Urgensi Pendidikan Karakter sebagai Upaya Membentuk Sikap Anti Korupsi. *Revolusi Pendidikan Karakter Bangsa*.
- Thompson, D. F. (2018). Theories of institutional corruption. *Annual Review of Political Science*, 21, 495-513.
- Transparency. (2018). *Form Of Corruption*. CC BY-ND 4.0. <https://www.transparency.org/glossary>
- Winataputra, U. S. (2014). Diskursus aktual tentang paradigma pendidikan kewarganegaraan (Pkn) dalam konteks Kurikulum 2013. *Bahan Diskusi Dalam Semnas PKn-AP3KnI*.
- Winataputra, U. S. (2015). Strategi Dasar Pembangunan Karakter Bangsa melalui Pendidikan untuk Membangun Demokrasi Pancasila. *Seminar Nasional Dan Rapat Kerja AP3KnI 28 – 29 Oktober 2015*.
- Wiyono, Suko. (2015). Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum. *Seminar Nasional Dan Rapat Kerja AP3KnI 28 – 29 Oktober 2015*.

Dokumen Formal :

- Indonesia. 2010. *Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025: Desain Induk*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017. tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subelo Wiyono, 2021

KONSTRUKSI DAN TRANSFORMASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 30 Tahun 2002. Tentang. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 31 tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Pendidikan Tinggi